

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, berdasarkan hasil penelitian, kenaikan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Bengkulu memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya adalah meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan fasilitas umum. Sementara itu, dampak negatif yang dirasakan masyarakat adalah bertambahnya beban pengeluaran rumah tangga, menurunnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor, serta berkurangnya penjualan pada sektor usaha dealer kendaraan. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum memahami mekanisme opsen pajak karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

Kedua, berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor pada dasarnya diperbolehkan karena bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah demi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Namun, penerapannya harus memenuhi prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), kemampuan (istitha'ah), amanah, dan perlindungan harta (hifz al-mal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan opsen PKB telah memenuhi aspek kemaslahatan karena mendukung

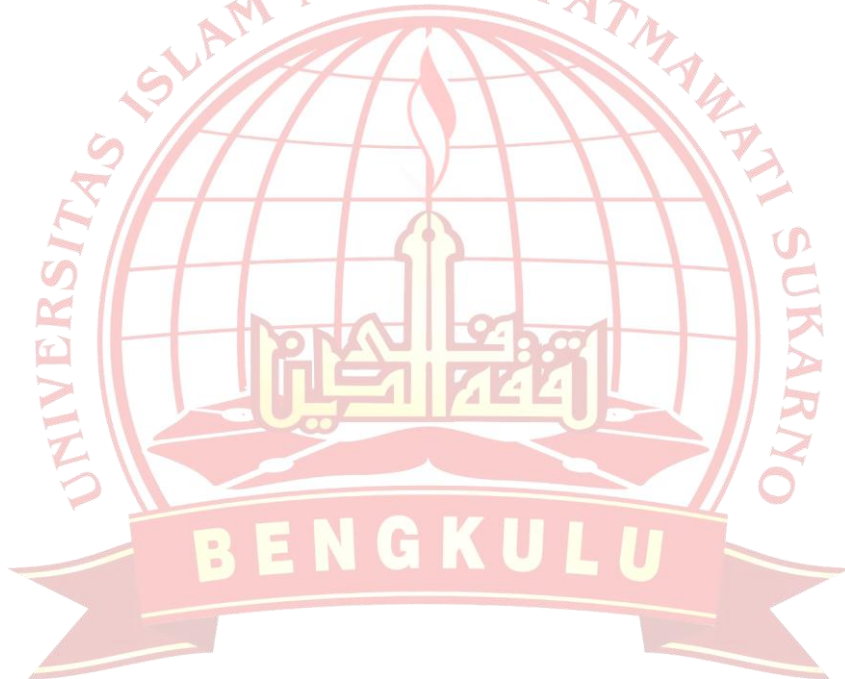
pembangunan daerah, tetapi dalam aspek keadilan dan kemampuan masih terdapat masyarakat yang merasa terbebani oleh kenaikan pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan pengawasan agar kebijakan tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

1. Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap besaran tarif opsen Pajak Kendaraan Bermotor agar penerapannya tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat.
2. SAMSAT Kota Bengkulu perlu meningkatkan sosialisasi mengenai mekanisme, tujuan, dan manfaat opsen Pajak Kendaraan Bermotor melalui berbagai media informasi sehingga masyarakat dapat memahami kebijakan tersebut secara lebih baik.
3. DPRD Provinsi Bengkulu perlu meningkatkan fungsi pengawasan terhadap penggunaan penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor agar dana yang terkumpul benar-benar digunakan untuk pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi pengelolaan dana hasil opsen Pajak Kendaraan Bermotor

dengan menyampaikan laporan penggunaan anggaran kepada masyarakat secara terbuka dan berkala.

5. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta menggunakan pendekatan yang lebih mendalam agar diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim.

Buku

Abdul Aziz Dahlan (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.

Abd al-Karim Zaydan. *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2006.

Abu Yusuf. *Kitab al-Kharaj*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1979.

Ahmad Hasan. *The Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1994.

Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Al-Suyuti, Jalal al-Din. *Al-Asybah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Jilid III. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.

Ibn 'Asyur, Muhammad al-Tahir. *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Tunis: Dar al-Salam, 2001.

Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi, 2023.

Marihot Pahala Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2007.

Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Oni Sahroni. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika, 2018.

Sadono Sukirno. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Edisi ke-2. Jakarta: Kencana, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Wahbah al-Zuhaili. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Jilid II. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid II. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid IV. Beirut/Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid V. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Yusuf al-Qaradawi. *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.

Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1973.

Skripsi / Penelitian

Muhammar Qadafi. *Mekanisme Penyaluran Dana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Riau Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*. Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

Putri Utami. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*. Skripsi. UIN Raden Fatah Palembang, tanpa tahun.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. *Laporan Penerimaan Opsern PKB Tahun 2025*. Bengkulu: Bapenda Provinsi Bengkulu, 2025.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. *Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025*. Bengkulu: Bapenda Provinsi Bengkulu, 2025.

Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu. *Kota Bengkulu dalam Angka 2025*. Bengkulu: BPS Kota Bengkulu, 2025.

Pemerintah Kota Bengkulu. *Dokumen APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025*. Bengkulu: Pemerintah Kota Bengkulu, 2025.

SAMSAT Kota Bengkulu. *Data Registrasi Kendaraan Bermotor Tahun 2025*. Bengkulu: SAMSAT Kota Bengkulu, 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

Wawancara

Agustus Surbakti. Kepala Cabang Dealer Honda Pagar Dewa Bengkulu. Wawancara, 15 Mei 2026.

Dedi Saputra. Pengemudi Ojek Online Kota Bengkulu. Wawancara, 18 Mei 2026.

Hidayat Darussalam. Dosen Hukum Ekonomi Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu. Wawancara, 20 Mei 2026.

Nopti Kurnia Illahi. Kasubbag Tata Usaha SAMSAT Kota Bengkulu. Wawancara, 12 Mei 2026.

Rudi Hartono. Manajer Pemasaran Dealer Kendaraan Bermotor Kota Bengkulu. Wawancara, 15 Mei 2026.

Siti Rahmawati. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Bengkulu. Wawancara, 19 Mei 2026.

Triadi Wiwin Yusef. Kasi Penetapan dan Penerimaan SAMSAT Kota Bengkulu. Wawancara, 11 Mei 2026.

Yogi Saputra. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Bengkulu. Wawancara, 20 Mei 2026.

Aminah. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Bengkulu. Wawancara, 19 Mei 2026

